

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DITUNJUK SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang

- : a. bahwa telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang kriteria Pejabat Fungsional yang dapat ditunjuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

Mengingat

- Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur, Peencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Kriteria Pejabat Fugsional yang dapat ditunjuk selaku Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan.

KEDUA : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang meliputi :

a. PPTK sebagaimana yang dimaksud merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA.

b. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang memenuhi kriteria.

KETIGA

: Penetapan kriteria pejabat fungsional yang disebutkan pada diktum KETIGA hurup b meliputi:

- a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;
- b. minimal memenuhi jejang jabatan fungsional umum Gol/ Ruang III/a;
- c. berpengalaman kerja dibidang tersebut minimal 2 tahun;
- d. kegiatan/ subkegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kedudukan pejabat fungsional yang diangkat pada SKPD/Unit SKPD;dan
- e. bertanggung Jawab dengan pekerjaan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Pagar Alam

pada tanggal: 10 januari 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI